



**PANDUAN
KETERPADUAN PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS
LINGKUNGAN KELUARGA
DENGAN SEKTOR LAINNYA**

KU SELATAN

612

SUS

D

KERJASAMA BKKBN DENGAN
KEMENTERIAN NEGERA PERUMAHAN,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL,
DEPARTEMEN PERTANIAN,
DEPARTEMEN AGAMA DAN
TIM PENGGERAK PKK PUSAT

Jakarta, 2008

PANDUAN KETERPADUAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN KELUARGA DENGAN SEKTOR LAINNYA

	DIAN SURABAYA		
NO.	13305		
TGL.	19-9-2022		
KELAS	56.7		
ASAL	PR	RT	



**KELUARGA KECIL
BAHAGIA SEJAHTERA**

**KERJASAMA BKKBN DENGAN
KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL,
DEPARTEMEN PERTANIAN,
DEPARTEMEN AGAMA DAN
TIM PENGGERAK PKK PUSAT**

Jakarta, Tahun 2008



PESAN PRESIDEN RI
KEPADA KELUARGA INDONESIA
PADA HARI KELUARGA NASIONAL XII

Saudara-saudaraku seBangsa dan seTanah Air,
Kekuatan Bangsa dan Negara terletak pada
ketahanan masing-masing keluarga.

Keluarga adalah cermin kekuatan masyarakat,
Bangsa dan Negara, oleh sebab itu patut dijaga,
dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya.

Untuk itu, saya mengajak setiap orang tua agar
dapat membangun keluarganya sebagai pilar
pembangunan yang kokoh, agar Bangsa
Indonesia semakin mantap melangkah menuju
hari esok yang sejahtera dan bermartabat dimata
dunia.

Keluargaku adalah martabatku

Jakarta, 29 Juni 2005
Presiden Republik Indonesia

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

KATA SAMBUTAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan YME, atas berkat rahmat-Nya, saya menyambut baik atas diterbitkannya **"PANDUAN KETERPADUAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN KELUARGA DENGAN SEKTOR LAINNYA"**

Panduan ini sebagai pedoman pelaksanaan terpadu Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga (PKLK) baik lingkungan fisik maupun non fisik keluarga. Lembaga / instansi yang telah melakukan kerjasama dalam bidang peningkatan kualitas lingkungan keluarga antara lain Departemen Agama, Departemen Pertanian, Meneg. Perumahan Rakyat/PU dan Tim Penggerak PKK Pusat.

Diterbitkannya buku panduan ini diperuntukan bagi Para Pengelola/ Pelaksana program dalam meningkatkan koordinasi, kerjasama dan keterpaduan pelaksanaan PKLK di lini lapangan bersama lembaga terkait, pemerintah, dan swasta.

Upaya sosialisasi program Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga secara terpadu terus akan ditingkatkan bersama lembaga terkait diberbagai tingkatan wilayah dari Pusat sampai dengan Propinsi, Kabupaten/Kota, sampai di desa.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan penyusunan buku panduan ini.

Jakarta, Juni 2008
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera
dan Pemberdayaan Keluarga


Drs. Pranyoto, MSC

KATA PENGANTAR

Visi BKKBN adalah meningkatkan Seluruh Keluarga Ikut KB dalam mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera melalui pelaksanaan Program KB Nasional. Pelembagaan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera erat sekali kaitannya dengan pembentukan kondisi lingkungan keluarga yang berkualitas, yang membutuhkan dukungan dan komitmen dari berbagai pihak.

Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga sebagai salah satu program yang pengelolannya melibatkan sektor terkait perlu keterpaduan seperti Departemen Pertanian, Kemeneg Perumahan Rakyat/PU, Departemen Agama serta Tim Penggerak PKK Pusat. Keterpaduan sektor tersebut adalah sebagai upaya untuk lebih memperfancar pengelolaan program Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga sehingga lebih efektif dan efisien sesuai harapan.

Sebagai program terpadu, Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga mempunyai peran sangat strategis dalam menunjang kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Keluarga yang berkualitas akan dapat terwujud apabila upaya pembinaan peningkatan kualitas lingkungan keluarga baik fisik dan non fisik dapat dilakukan.

Kami berharap semoga buku ini dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan program PKLK di lini lapangan.

Jakarta, Juni 2008
Direktorat Peningkatan Kualitas
Lingkungan Keluarga
Direktur,



Drs. Sunarto, HM, MPD

DAFTAR ISI

	Halaman
Pesan Presiden RI Kepada Keluarga Indonesia Pada Hari Keluarga Nasional XII	i
Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	v
Daftar isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Sasaran dan Jangkauan	2
D. Batasan/Pengertian	3
BAB II POKOK-POKOK KEGIATAN	5
A. Perencanaan	6
B. Pelaksanaan	9
BAB III PROSEDUR KEGIATAN	17
A. Persiapan	17
B. Prosedur	22
BAB IV PEMANTAUAN, PELPORAN DAN EVALUASI	29
A. Pemantauan/Pembinaan	29
B. Pelaporan	29
C. Evaluasi	29
BAB V PENUTUP	31
Lampiran 1	33
Lampiran 2	36
Lampiran 3	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka merevitalisasi program KB di era desentralisasi, BKKBN selaku pengelola program KB pada tingkat Nasional telah mencanangkan visi, misi dan grand strategi sebagaimana tercantum dalam peraturan kepala nomor 28/HK.080/B5/2007 Visi BKKBN "Seluruh Keluarga Ikut KB" dengan Misi "Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera", grand strategi yang dikembangkan ialah: (1) mengupayakan dan mengembangkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam penggunaan KB, (2) menata kembali pengelolaan program KB, (3) memperkuat sumber daya manusia operasional program KB, (4) meningkatkan ketahanan keluarga melalui pelayanan KB, (5) meningkatkan pembiayaan program KB.

Untuk mewujudkan visi, misi dan grand strategi dalam pelaksanaan program KB tersebut, peningkatan kualitas lingkungan keluarga menjadi program yang sangat penting.

Melalui lingkungan keluarga berkualitas, akan memudahkan keluarga untuk melaksanakan fungsi-fungsi keluarga dengan baik dan optimal; adapun fungsi-fungsi itu meliputi fungsi agama, fungsi budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi ekonomi dan fungsi pelestarian lingkungan.

Upaya mewujudkan kualitas lingkungan keluarga meliputi banyak aspek, perlu ada keterpaduan dari berbagai sektor.

Agar program ini dapat berjalan dengan baik, perlu suatu pedoman operasional keterpaduan program peningkatan kualitas lingkungan keluarga yang dapat dipakai sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan baik ditingkat pusat maupun di daerah propinsi dan Kabupaten/Kota.

Buku panduan disusun atas kerjasama instansi terkait antara lain BKKBN Departemen Agama, Departemen Pertanian, Meneg. Perumahan Rakyat dan Tim Penggerak PKK Pusat.

B. TUJUAN

1. Terlaksananya Keterpaduan Program dan Kerjasama lintas sektor pelaksanaan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga (PKLK) guna mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.
2. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku petugas pengelola dan pelaksana serta seluruh keluarga Indonesia baik di Pusat maupun di daerah dalam kegiatan pelaksanaan program PKLK Terpadu.
3. Mengintensipkan program serta hasil-hasilnya dalam pelaksanaan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga di berbagai tingkatan wilayah.

C. SASARAN DAN JANGKAUAN

1. Sasaran

- a. Langsung : Keluarga, utamanya Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera.
- b. Tidak langsung:
 - 1) Penentu Kebijakan Pusat dan Daerah
 - 2) dinas/Instansi terkait
 - 3) Pengelola dan pelaksana
 - 4) LSOM, Swasta
 - 5) Masyarakat (tokoh formal/informal)

2. Jangkauan

Seluruh wilayah mulai dari Pusat sampai Kelurahan/Desa, RW.

D. BATASAN/PENGERTIAN

- i. Keterpaduan program PKLK adalah :** Seluruh rangkaian kegiatan PKLK program dan kegiatan yang dilakukan lintas sektor mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam satu wadah yang terkoordinasi agar efektif dan efisien.
- ii. Pengelolaan PKLK adalah** upaya terencana untuk mengarahkan terciptanya peningkatan kualitas lingkungan yang kondusif dalam mewujudkan keluarga berkualitas.
- iii. Mitra Kerja** adalah perseorangan atau lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah, lembaga sosial dan organisasi masyarakat (LSOM) yang turut berperan serta dalam pengelolaan program KB Nasional.
- iv. Lingkungan keluarga** adalah seluruh aspek hidup dan kehidupan yang ada dimasing-masing keluarga termasuk hubungan timbal balik antar anggota antar keluarga, masyarakat dan alam sekitarnya (aspek fisik dan non fisik/ delapan fungsi keluarga).
- v. Kualitas Lingkungan Keluarga** adalah seluruh aspek hidup dan kehidupan yang ada di lingkungan masing-masing, meliputi kreatifitas, hubungan keluarga, kesehatan, kebersihan, religi, keagamaan, sosial, kebutuhan ekonomi, pendidikan.
- vi. Keluarga Berkualitas** adalah keluarga yang sehat, sejahtera, maju, mandiri, jumlah anak ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- vii. **Keluarga Sejahtera** adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat lingkungannya.
- viii. **Keluarga Pra Sejahtera** adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimalnya seperti kebutuhan akan agama, pangan, sandang, papan, dan kesehatan.
- ix. **Keluarga Sejahtera I** adalah keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologis.

BAB II POKOK-POKOK KEGIATAN

Untuk melakukan kegiatan perlu memperhatikan prinsip-prinsip keterpaduan dalam pengelolaan program PKLK. Prinsip-prinsip keterpaduan dimaksudkan adalah untuk menyatukan berbagai kegiatan dari masing-masing sektor yang terlibat untuk di sinergikan, agar mencapai hasil maksimal. Untuk itu keterpaduan program PKLK lebih diarahkan pada kesamaan gerak, langkah dalam pelaksanaan operasionalisasi di lapangan agar memberi manfaat lebih baik bagi pihak terkait serta masyarakat pemakai. Prinsip-prinsip keterpaduan tersebut sebagai berikut:

1. **Koordinasi**, adanya suatu kerjasama yang terpadu antar sektor dalam keterpaduan program PKLK mulai dari pembuatan kesepakatan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Koordinasi dapat terlaksana apabila ada suasana keterbukaan, kebersamaan, saling membutuhkan, saling mengisi dan memberi dan menyadari keterbatasan kemampuan masing-masing pihak.
2. **Integrasi**, penyatuan berbagai program kegiatan dari sektor yang berhubungan dengan program PKLK, integrasi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran yang ada pada wewenang sektor terkait, agar dapat dicapai hasil yang optimal.
3. **Simplifikasi**, lebih ditujukan pada upaya percepatan pelaksanaan program melalui penyederhanaan jalur birokrasi, penetapan sasaran strategis dan perencanaan yang matang. Untuk itu Pembentukan POKJA Keterpaduan PKLK, pemanfaatan sarana yang ada serta rapat/pertemuan rutin akan dapat mendukung terlaksananya upaya ini.
4. **Partisipatif**, Diarahkan pada upaya peningkatan peran serta LSOM, TOGA, TOMA dan masyarakat dari keluarga dalam upaya

PKLK secara terpadu. Peran serta aktif masyarakat dan keluarga secara langsung akan memberi dampak pada menumbuhkan kesadaran dan semangat setiap keluarga untuk mau membangun dirinya bersama masyarakat lingkungannya, sehingga mampu meningkatkan kualitas lingkungan keluarga mereka.

A. TAHAP PERENCANAAN

1. Mengupayakan adanya dukungan legal aspek

Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga bersifat multi sektor, untuk itu perencanaan harus tertuang dalam format yang legal berupa Peraturan Daerah, Keputusan Bupati/Walikota, tertuang dalam APBD, Perda, Rapetada sampai peraturan Desa/Kelurahan.

2. Identifikasi dan Inventarisasi

Identifikasi dan inventarisasi keluarga sasaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan Hasil Pendataan Keluarga. Data Hasil Pendataan Keluarga memuat data mikro tentang keberadaan keluarga baik data demografis, maupun indikator kesejahteraan seperti, pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan kebutuhan sosial psikologis, kebutuhan pengembangan dan aktualisasi diri.

Data yang ada dapat dimanfaatkan sebagai data awal oleh lintas sektor (PU/Perumahan Rakyat, Agama, Pertanian, PKK) untuk mengidentifikasi kondisi kualitas lingkungan keluarga, karena memuat indikator-indikator; seperti kondisi fisik, rumah masih berlantai tanah, dan luas ruangan yang sempit tidak memenuhi standar minimal 8 m²/orang, non fisik seperti pelaksanaan ibadah, serta partisipasi keluarga dalam lingkungan sosial.

3. Pemetaan

Dari potret keadaan keluarga yang telah dianalisis kemudian dituangkan dalam bentuk peta sasaran, terutama yang memuat tentang permasalahan yang berkaitan dengan program PKLK sehingga mempermudah dalam upaya menentukan intervensi secara terpadu. Hasil pemetaan dapat dituangkan dalam bentuk tabel permasalahan, rencana intervensi, bentuk intervensi, kemampuan yang tersedia, dan dukungan pihak lain serta masyarakat.

Identifikasi dan analisa data yang dituangkan dalam peta PKLK, dilakukan secara terpadu oleh POKJA PKLK secara berjenjang, mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Pada tingkat Desa dan Kecamatan peran Petugas KB Lapangan serta petugas pengelola KB Kecamatan lebih besar selaku leading sektor dilapangan.

4. Penyusunan Rencana

Penyusunan rencana kegiatan keterpaduan program PKLK didasarkan pada hasil data dan pemetaan. Untuk lebih memudahkan penyusunan rencana dapat juga dituangkan dalam bentuk tabel Rencana kegiatan yang memuat permasalahan, rencana intervensi, dan langkah-langkah intervensi.

Penyusunan rencana kegiatan disusun bersama-sama dengan lintas sektor terkait dengan memperhatikan:

- Kewenangan dan kemampuan dari masing-masing sektor yang terkait dana, daya, sarana dan metode.
- Potensi wilayah yang dapat dimanfaatkan.
- Dukungan pihak lain serta masyarakat.

Rencana Kegiatan Keterpaduan Program PKLK dapat dibuat dalam bentuk Matrik berikut:

Contoh :

Rakor PKLK

Kabupaten : Purworejo

Target : 10 Kelompok Model

No	Kegiatan	Perkiraan Biaya	Penanggung jawab	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	
						Kec.	Des
1	Penyuluhan & materi	1.500.000	SKPDKB Kab/Kota	APBD			
2	Pemberian bibit	2.750.000	Deptan	APBD/ APBN			
3	Pertbaikan jalan kampung	6.000.000	PU	APBD/ APBN			
4	Pembinaan	1.000.000	PKK	APBD			
5	Orientasi/ Pelatihan	5.000.000	SKPDKB Kab/Kota	APBD			
6	Konseling Keluarga	1.500.000	Depag	APBD/ APBN			
7.	Jumlah Akseptor						

Rencana tersebut menjadi bagian dari usulan masing-masing dinas terkait, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu. Supaya keterpaduan tersebut berjalan efektif perlu ada pengorganisasian yang jelas dimasing-masing tingkat wilayah.

B. TAHAP PELAKSANAAN

Kegiatan Keterpaduan Program PKLK dilaksanakan melalui:

1. Advokasi

Kegiatan Advokasi dilakukan untuk menghasilkan dukungan terhadap program PKLK dalam bentuk kebijakan yang mendukung pelaksanaan program PKLK. Advokasi dilakukan secara terpadu oleh sektor terkait, BKKBN, Depag, Deptan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan TP PKK. Pada tingkat daerah dilakukan oleh instansi yang ditunjuk menangani permasalahan ini.

Sasaran Advokasi adalah:

- Penentu atau pembuat kebijakan
 - Gubernur, Bupati/Walikota
 - DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota
 - Dan lain-lain
- Mitra Kerja terkait
- Kelompok

Advokasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan forum/momentum seperti ; Rapat koordinasi, Kunjungan/pendekatan, Rapat-rapat lain seperti Badan Perwakilan Desa/Kelurahan dan lainnya.

2. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)

Pelaksanaan KIE dilakukan secara terpadu oleh sektor terkait di pusat dan daerah, pengelolaan program yang melibatkan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama **dengan sasaran** keluarga dan masyarakat. KIE dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan keluarga terutama yang terkait program PKLK, sehingga dapat mengubah sikap dan perilaku keluarga atau masyarakat kearah lebih baik dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan keluarga melalui penyebaran informasi Program PKLK.

Pelaksanaan KIE dapat dilakukan melalui KIE massa/KIE kelompok dan KIE individu, dengan memanfaatkan media dalam bentuk media cetak, elektronik, serta media tradisional yang diberi muatan PKLK.

Yang harus diperhatikan dalam melaksanakan KIE adalah:

- Menetapkan segmentasi sasaran dari masing-masing sektor secara terpadu.
- Menetapkan strategi KIE
- Mendesain isi pesan KIE dan menyiapkan media KIE
- Bersama-sama melaksanakan KIE sesuai sasaran.
- Mengevaluasi hasil KIE

Kegiatan KIE dapat dilakukan melalui:

- Pertemuan Kader/IMP, kelompok secara terpadu.
- Rapat Koordinasi
- Berbagai forum komunikasi sosial lainnya.
- Tatap muka/kunjungan rumah secara terpadu
- Berbagai media yang bisa dikembangkan di wilayah

Materi KIE meliputi:

- Visi dan misi program KB Nasional
- Pemberdayaan Keluarga menuju Keluarga Berkualitas
- Apa dan bagaimana lingkungan keluarga berkualitas
- Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga
- Upaya peningkatan kualitas lingkungan fisik
- Upaya peningkatan kualitas lingkungan non fisik
- Pengelolaan kualitas lingkungan keluarga
- Upaya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan fasilitasi perumahan untuk membantu keluarga utamanya keluarga miskin (Pra-S dan KSI)
- Pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman produktif dan bernilai tinggi
- Upaya penggerakan keluarga utamanya keluarga miskin (Pra-S dan KSI) yang bergabung dalam kelompok BLK

- Memberdayakan keluarga utamanya keluarga miskin (Pra-S dan KS1) yang tergabung dalam kegiatan lain seperti majelista klim, UP2K, UPPKS.

3. Pelayanan terpadu program PKLK

Pelaksanaan pelayanan keluarga secara terpadu dalam program PKLK dilaksanakan oleh Para pengelola/Petugas Program KB bersama Departemen Agama, Deptan, TP-PKK, Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan dukungan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama yang menyangkut aspek pelayanan lingkungan fisik keluarga dan lingkungan non fisik sesuai dengan rencana yang disusun secara terpadu.

Berikut beberapa contoh yang kemudian dapat dikembangkan lebih lanjut di daerah sesuai kebutuhan dan kondisi setempat.

3.1. Aspek lingkungan fisik keluarga

BKKBN Pusat dan Propinsi serta instansi pengelola Program KB di daerah berperan sebagai fasilitator dalam menyiapkan data kebutuhan dan permasalahan lingkungan fisik keluarga yang dihadapi sejumlah keluarga utamanya miskin (Pra Sejahtera dan KS1) berdasarkan data basis R/I/KS, yaitu keluarga yang mempunyai permasalahan seperti rumah (tantai bukan dari tanah dan luas ruangan > 8 m²), maupun luar rumah (pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk produktifitas keluarga).

- a. Kementerian Negara Perumahan Rakyat melalui instansi yang berwenang mengurus perumahan di daerah dapat berfungsi sebagai fasilitasi dalam pembangunan perumahan terutama bagi keluarga utamanya keluarga miskin (Pra Sejahtera, Keluarga

Serjahtera 1) serta fasilitasi dalam pembenahan wilayah kumuh dan miskin.

Dukungan:

Untuk pengadaan/perbaikan rumah dan pemukiman bagi keluarga miskin diharapkan ada dukungan sepenuhnya dari pemerintah daerah seperti: Dukungan untuk perbaikan lingkungan yang rumahnya kurang memenuhi syarat dari aspek pencahayaan, Aladin (atap, lantai, dinding), tata guna ruang, dan simulasi udara. Penyediaan lahan yang layak, bebas dari bahaya banjir dan bencana alam lainnya,

Pelaksanaan : Meneg. Perumahan Rakyat dan Instansi yang berwenang mengelola perumahan di daerah, Pengelola/Petugas program KB, TP. PKK. Instansi terkait lainnya di daerah/PEMDA, dibantu oleh Kader atau Tokoh Masyarakat.

- b. Pelayanan pengelolaan PKLK oleh Deptan bisa berjalan dalam bentuk bantuan bibit tanaman hortikultura, tanaman yang mempunyai nilai jual tinggi, seperti untuk dekorasi dan lainnya, sehingga peningkatan kualitas lingkungan fisik keluarga dapat juga memberi tambahan pendapatan keluarga utamanya keluarga Pra Sejahtera dan KS1 yang tergabung dalam kelompok BLK (diperoleh manfaat ganda). Sejalan dengan itu diharapkan adanya bimbingan dan penyuluhan pertanian tentang cara menanam tanaman yang baik kepada keluarga miskin.

Pelaksana : Pengelola program pertanian, PPL dengan dibantu instansi terkait dan dukungan tokoh formal dan informal kader dan masyarakat.

Selain itu upaya pemanfaatan lahan pekarangan dalam peningkatan usaha tani sayuran dan biofarmaka perlu disosialisasikan ke berbagai lapisan masyarakat pada saat pelayanan berlangsung utamanya pada keluarga-keluarga yang tergabung dalam kelompok kegiatan dengan memperhatikan iklim, kondisi tanah/lahan pekarangan keluarga.

Sebagai motivator, dinamisator Tim Penggerak PKK dan kader-kader PKK diharapkan dapat membangkitkan motivasi keluarga-keluarga utamanya keluarga Pra Sejahtera dan KS1 untuk bergabung dalam kelompok kegiatan BLK dalam pelaksanaan peningkatan kualitas lingkungan fisik dan non fisik. Upaya pemanfaatan lahan pekarangan yang selama ini di galakkan TP PKK seperti Apotik/Warung Hidup, tetap dilanjutkan.

Pelaksana : TP. PKK Pengelola/Petugas KB, Kemeneg Perumahan Rakyat, Tokoh Masyarakat, Kader.

3.2. Aspek Lingkungan non fisik keluarga

Dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan non fisik keluarga, unsur Departemen Agama sangat diperlukan guna mengembangkan dan menyebar luaskan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah melalui antara lain :

- Pendidikan agama dalam keluarga
- Pendidikan atau ceramah agama dalam masyarakat
- Pendidikan agama melalui lembaga pendidikan formal, kursus calon pengantin, peningkatan kegiatan konseling keluarga, pembinaan remaja usia nikah dll.

Dalam kaitan ini upaya pelayanan lingkungan non fisik keluarga oleh keluarga yang tergabung dalam kelompok kegiatan dapat diberikan pendidikan orientasi/pelatihan agama baik formal maupun informal, serta kursus calon pengantin, perkumpulan pengajian anggota BLK di wilayah garapan yang dilakukan minimal setiap bulan sekali.

Pelaksana : Para pengelola/petugas program KB, unsur TP, PKK, unsur agama dan dukungan masyarakat, Penyuluh Agama, Tokoh Agama serta Kader.

Pelayanan oleh pengelola/petugas program KB (unsur KB baik di propinsi/Kab/Kota) mengedepankan 8 fungsi keluarga agar dapat diterima dan dilaksanakan di keluarga (misalnya : konseling pengantin, dan menciptakan hubungan atau interaksi sosial antar keluarga, interaksi sosial antara keluarga dengan masyarakat serta interaksi sosial antara keluarga/masyarakat dengan lingkungannya melalui kelompok-kelompok kegiatan seperti pengajian sebagai wadah pembelajaran pembinaan Agama.

Pelaksana : Pengelola/Petugas program KB, Unsur Deptan, TP, PKK unsur Kepmeneg Perumahan Rakyat, Dinas terkait, Tokoh Agama dan Masyarakat di wilayah garapan.

TP, PKK sebagai motivator dan penggerak serta dinamisator di wilayah garapan agar dapat mengajak keluarga sebanyak-banyaknya agar turut serta, bergabung dalam kelompok kegiatan bukan saja memahami, tetapi harus dapat mengimplementasikan pelaksanaan 8 fungsi keluarga.

Sejalan dengan itu dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan 8 fungsi keluarga secara terpadu oleh Deptan, Depag, Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan TP. PKK, Tokoh Agama/Masyarakat, Dinas Terkait mendapat perhatian besar.

Perlu adanya sarana dan prasaran di wilayah garapan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan keagamaan misalnya : masjid, balai pengajian islam, dan lain-lain.



BAB III PROSEDUR KEGIATAN

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan kegiatan keterpaduan program PKLK antara BKKBN, Deptan, Depag, Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan TP. PKK, maka disusunlah organisasi dan prosedur pelaksanaan kegiatan PKLK baik ditingkat Pusat sampai ditingkat Daerah.

Namun demikian mengingat UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kegiatan bukan lagi dilakukan secara sentralisasi tetapi desentralisasi artinya bahwa kewenangan diserahkan kepada Pemerintah dan Masyarakat di daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab, maka dalam kaitan ini hendaknya pelaksanaan keterpaduan program PKLK dapat dilaksanakan al :

- Memperhatikan prinsip-prinsip otonomi daerah.
- Dalam pelaksanaan keterpaduan program PKLK daerah dapat menyusun dan melaksanakan Panduan berdasarkan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan/disusun serta menetapkan indikator keberhasilan dalam pelaksanaannya.
- Mengingat pelaksanaan operasionalisasi ada di lapangan perlu ada bimbingan teknis secara terpadu. Oleh karena itu perlu pengorganisasian dan prosedur pengelolaan keterpaduan program PKLK antara BKKBN, Deptan, Depag, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, TP. PKK dalam PKLK sebagai berikut :

A. PERSIAPAN

Dalam persiapan membentuk pokja atau pengorganisasian. Dengan tujuan terciptanya jejaring kerja dan juga sebagai wadah partisipasi aktif dengan sektor terkait, LSOM dan keluarga dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga. Wadah ini juga adalah sebagai penampung

permasalahan yang muncul, upaya pemecahan, dan rangkaian upaya kegiatan PKLK dari perencanaan sampai evaluasi. Organisasi juga berfungsi sebagai advokator yang akan memberi advokasi keberbagai pihak yang berkompeten.

Dalam kaitan ini tujuan dibentuknya pengorganisasian adalah:

- a. Membentuk Tim Kerja terpadu yang terdiri dari BKKBN, Deptan, Depag, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, TP. PKK dan LSOM yang mempunyai program peningkatan kualitas keluarga baik fisik maupun non fisik untuk bisa tertampung dalam satu wadah, sehingga upaya peningkatan kualitas keluarga bisa secara terpadu dan terkoordinasi, dan memberi hasil yang optimal.
- b. Memberikan keluwesan, dalam arti tugas, fungsi dan wewenang masing-masing sektor, tetap mengacu pada apa yang ditetapkan oleh masing-masing instansi/organisasi.
- c. Menghindari terjadinya tumpang tindih program dari masing-masing sektor.

Struktur Kepengurusan, Tugas dan Fungsi POKJA PKLK

1. POKJA Pusat

Adapun susunan Pokja pengelolaan keterpaduan program PKLK ditingkat Pusat sebagai berikut:

- | | | |
|------------|---|---|
| Penasehat | : | Kepala BKKBN |
| Ketua | : | Deputi Bidang KS&PK |
| Sekretaris | : | Direktur Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga |
| Anggota | : | ➤ Unsur BKKBN
➤ Unsur Deptan
➤ Unsur Depag
➤ TP. PKK
➤ Unsur Perumahan Rakyat
➤ Unsur Depdagri |

- Depkes
- Toma/Tokoh Agama
- LSOM Swasta dll.

Koordinasi dan penanggung jawab umum adalah Kepala BKKBN Pusat dan Deputi Bidang KS&PK sebagai penanggung jawab operasional PKLK.

- | | | |
|------------|---|--|
| Penasehat | : | Kepala BKKBN |
| Ketua | : | Deputi Bidang KS&PK |
| Sekretaris | : | Direktur Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga |
| Anggota | : | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Unsur BKKBN ➤ Unsur Deptan ➤ Unsur Depag ➤ TP. PKK ➤ Unsur Perumahan Rakyat ➤ Unsur Depdagri ➤ Unsur Kesehatan ➤ Toma / Tokoh Agama ➤ LSOM Swasta dll. |

Tugas dan fungsi Pokja tingkat Pusat

Dengan mengacu kepada arahan Kepala BKKBN, Kelompok Kerja (Pokja) Keterpaduan program PKLK tingkat Pusat menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut.

• Tugas :

Tugas Pokja adalah agar BKKBN mengkoordinasikan kegiatan atau program Deptan, Depag, Kemeneg Perumahan Rakyat, TP. PKK untuk di padukan atau disatukan secara terpadu dalam pelaksanaan program PKLK.

Menyiapkan perumusan kebijakan umum keterpaduan program PKLK, perencanaan dan melakukan evaluasi dan bimbingan secara terpadu.

- **Fungsi**

- Menyusun kebijakan umum keterpaduan program PKLK serta melaksanakan program PKLK secara terpadu.
- Membuat pedoman teknis/standar, fasilitasi keterpaduan program PKLK.
- Merencanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterpaduan program PKLK secara terpadu.
- Melaksanakan bimbingan dan pembinaan operasional pelaksanaan keterpaduan program PKLK secara terpadu.
- Melaporkan secara berjenjang kegiatan Pokja dalam pengelolaan Keterpaduan program PKLK.

2. POKJA Propinsi

Untuk kelancaran kegiatan keterpaduan program PKLK selain membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Keterpaduan program PKLK tingkat Pusat juga membentuk Pokja ditingkat Daerah.

- Gubernur KDH Tingkat I sebagai penanggung jawab umum dalam pelaksanaan Keterpaduan program PKLK.
- Sekretaris Daerah sebagai koordinator dalam penyelenggaraan Keterpaduan program PKLK.
- BKKBN Propinsi sebagai penanggung jawab operasional keterpaduan program PKLK.
- Untuk kelancaran kegiatan Keterpaduan program PKLK telah dibentuk Pokja Keterpaduan program PKLK dengan susunan keanggotaan Pokja tingkat Propinsi sebagai berikut:

Ketua	:	Sekda/Unsur Pemda yang ditunjuk Gubernur
Sekretaris	:	Ka. BKKBN Propinsi
Anggota	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Unsur BKKBN Propinsi ➤ TP. PKK Propinsi ➤ Unsur Pertanian ➤ Unsur Agama ➤ Institusi yang menangani ➤ Perumahan ➤ Unsur Kesehatan bila perlu ➤ Tokoh Masyarakat/Toga ➤ LSOM, Swasta ➤ Dan lain-lain yang dirasa perlu

Tugas dan ungsi Pokja Tk. Propinsi

- **Tugas:**

Dengan mengacu pada arahan Gubernur/KDH tingkat I dan Kepala BKKBN Propinsi Pokja Propinsi menjabarkan kebijakan keterpaduan program PKLK dari Pusat dan sekaligus mensosialisasikan keterpaduan program PKLK.

- **Fungsi:**

- Sebagai perpanjangan tangan dari BKKBN Pusat adalah untuk memfasilitasi daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk kebijaksanaan operasional, rencana logis, bantuan dan sarana, serta pedoman operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.
- Menyusun rencana penyelenggaraan keterpaduan program operasional PKLK di Kab/Kota meliputi : sasaran program, pemilihan prioritas program, jadwal kegiatan dan rencana anggaran secara terpadu.

- Melakukan Advokasi secara terpadu tentang rencana penyelenggaraan keterpaduan program operasional PKLK kepada pemerintah Kab.Kota, Lintas sektor terkait serta Badan Legislatif.
- Melaksanakan bimbingan dan pembinaan secara terpadu dalam pengelolaan keterpaduan program PKLK.
- Melaporkan perkembangan kegiatan program PKLK kepada Gubernur, tembusan kepada Pokja Pusat, Bupati/Walikota, Tim Pengelola Keterpaduan Program PKLK tingkat I dan tingkat II untuk diketahui dan ditanggapi.

3. POKJA Kabupaten/Kota

Berdasarkan UU No. 32/2004, tentang Otonomi Daerah, maka sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya pola pelaksanaan operasional atau prosedur operasional Keterpaduan program PKLK yang telah dan akan disusun baik dari aspek programatis maupun substansi mulai dari perencanaan kegiatan sampai pada tahap evaluasi diserahkan kepada Tk. Kabupaten/Kota masing-masing.

B. PROSEDUR

Dengan prosedur kerja dimaksudkan proses pelaksanaan suatu program berdasarkan suatu rangkaian kegiatan yang sudah ada menurut tata organisasi dalam rangka program terpadu yang telah ditetapkan.

Mekanisme operasional yang meliputi perencanaan pelaksanaan serta bimbingan, monitoring dan evaluasi disiapkan dalam Rakor (Rapat Koordinasi) secara bertingkat mulai dari Tingkat Pusat, Propinsi, Kab/Kota dan Kecamatan, Desa.

Fungsi Pokja Pusat adalah memfasilitasi, kebijakan, rencana dan panduan, sedangkan Propinsi sebagai perparipangan dengan BKKBN pusat adalah membantu agar POKJA Kabupaten/Kota dapat berjalan dengan baik. Pokja Kab/Kota berfungsi Operasional, untuk itu perencanaan operasional dibuat lebih rinci sesuai sasaran.

Untuk lebih lanjut digambarkan sebagai berikut:

1. Tingkat Kabupaten/Kota

Lembaga pengelolaan/pelaksanaan program KB bersama unsur terkait secara terpadu di Kabupaten/Kota menjabarkan perumusan kebijakan dan strategi PKLK yang telah ditetapkan dan disepakati oleh Pusat dan Propinsi menjadi Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Terpadu di Kabupaten/Kota.

Berdasarkan JUKLAK tersebut kemudian Kecamatan/Kelurahan melaksanakan Rapat Koordinasi untuk menyusun rencana kerja (RENJA) Program PKLK terpadu berdasarkan daftar permasalahan kualitas lingkungan keluarga di Desa/Kelurahan.

Bersama dengan unsur terkait merencanakan kebutuhan kegiatan operasional secara terpadu berdasarkan pendataan keluarga dari Tk. Kecamatan/Desa. Rencana kegiatan terpadu yang telah disusun tersebut dibahas dalam Rakor Kabupaten/Kota menjadi kegiatan Operasional terpadu Kecamatan dan Desa.

Dalam Rakor telah disepakati adanya pembagian tugas secara jelas dari setiap unsur terkait melaksanakan apa, bagaimana tata cara pelaksanaannya, dimana pelaksanaan kegiatan, sasaran kegiatan, target kegiatan yang dilakukan, kapan dilaksanakan serta apakah sudah siap dukungan operasional PKLK baik dari aspek dana tenaga dan sarana.

Rapat koordinasi dipimpin oleh Bupati/ Walikota dengan sekretaris : Unsur SKPDKB Tk. Kab/Kota, anggota adalah Pokja Tk. Kab/Kota.

2. Tingkat Kecamatan

Peran camat adalah memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran pelaksanaan keterpaduan program PKLK di wilayah kerjanya, oleh karena itu kegiatan yang telah disusun dan disepakati ditingkat Kab/Kota segera ditindak lanjuti pelayanan operasional terpadu ditingkat Kecamatan. Untuk itu Kecamatan juga menyusun rencana terpadu bersama sektor terkait.

Rencana terpadu tersebut dibahas dalam Rakor Kecamatan yang meliputi al : selain evaluasi bulan yang lalu, (permasalahan tingkat desa), penyempurnaan rencana, pembahasan rencana Kab/Kota, pengendalian operasional serta menyepakati pelayanan teknis operasional ditingkat desa kebawah. Kapan pelaksanaan kegiatan dimulai, dan adanya pembagian secara jelas dan tegas dari sektor terkait yaitu sektor mana berbuat apa dan melaksanakan apa, dan sebagainya. dalam kegiatan rakor Kecamatan, juga membahas permasalahan di Desa yang tidak bisa diselesaikan tanpa bantuan Kecamatan.

Dalam Rakor Kecamatan diusahakan dipimpin oleh Camat, sekretaris Pengendali program KB, dengan peserta Pokja tingkat Kecamatan.

Materi yang dibahas dalam Rakor Kecamatan

- Pelaksanaan pelayanan PKLK baik fisik dan Non fisik ditingkat Desa.
- Pelayanan Advokasi dan KIE PKLK terpadu > Tata cara dan teknis operasional program PKLK tingkat Desa.
- Penyelenggaraan pelayanan PKLK > Membentuk satuan tugas dalam bentuk Tim/Perseorangan sebagai pengelola/pelaksana operasional untuk menggarap wilayah Kecamatan.

3. Tingkat Desa

Secara umum peran Kepala Desa/Lurah adalah memberikan dukungan dan jaminan pelaksanaan pelayanan teknis operasional terpadu program PKLK di wilayah kerjanya agar berjalan dengan lancar sesuai aturanyang berlaku.

Untuk itu ditingkatkan desa segera menjabarkan kegiatan yang telah ditetapkan dan disepakati ditingkat Kecamatan menjadi pelayanan teknis operasional terpadu ditingkat desa oleh seluruh Para Pengelola/Pelaksana, semua unsur terkait terpadu bersama seluruh Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama setempat. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengetahui berapa jumlah keluarga yang akan diintervensi karena mempunyai permasalahan lingkungan keluarga baik fisik maupun non fisik.

Penyusunan rencana kegiatan tersebut dapat di mulai dari selain identifikasi potensi wilayah meliputi yaitu peluang, tantangan, kekuatan dan masalah yang ada di wilayah garapan, juga hasil pendataan yang telah dianalisa dengan menggunakan data basis keluarga (R/I/KS), pada tingkat Desa/Kelurahan Rek.Des.R/I/PUS.

Tindak Lanjut

Setelah rencana kegiatan terpadu disusun secara matang, maka segera ditindak lanjuti rencana kegiatan tersebut menjadi kegiatan dengan melakukan pelayanan, baik dari aspek kesiapan tenaga, dana, sarana dan jadwal kegiatan, termasuk tugas-tugas dari sektor terkait sehingga tujuan yang diharapkan melalui pelayanan secara terpadu dapat tercapai dengan baik.

Pelayanan dimaksudkan adalah selain melakukan KIE/ Penyuluhan terhadap keluarga oleh Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, IMP, serta melibatkan Para Pengelola/Dinas

terkait, secara terpadu, juga dalam pelayanan lebih mengupayakan intervensi keluarga secara operasional sesuai rencana kegiatan.

Kemudian dari kegiatan yang telah disusun tersebut di bahas dalam Rapat Koordinasi untuk memperoleh komitmen dan kesepakatan dalam pelaksanaan pelayanan secara terpadu.

Rapat dipimpin oleh Kepala Desa, sekretaris PLKB/PKB dengan anggota Pokja tingkat Desa/Kelurahan.

Materi yang dibahas dalam Rakor:

Contoh:

a. Pelayanan secara terpadu dalam keterpaduan program PKLK secara fisik:

- Upaya meningkatkan kualitas dan kesehatan lingkungan perumahan diwilayah garapan. (Mis : luas ruang 8 m²/orang tidak pengap, lantai bukan dari tanah/tidak lembab, pencahayaan cukup, bila berternak kandang tidak boleh didalam rumah dll).
- Membangun jalan lingkungan
- Membangkitkan motivasi keluarga agar mau bergabung dalam kelompok kegiatan untuk melaksanakan PKLK.
- Dukungan tanaman bibit hortikultura, biofarmaka, Tabulapot, Warung hidup dll.
- Orientasi tata cara penanaman bibit tanaman hortikultura dsb.
- Penggerakan keluarga yang tergabung dalam poktan diwilayah garapan.

b. Pelayanan keterpaduan program PKLK non fisik secara terpadu

- Pendidikan rohani baik formal/informal, serta dukungan infrastruktur yang terkait dengan ibadah.
- Membangun dan mengembangkan hubungan antar keluarga dan keluarga, antara keluarga dan masyarakat, serta masyarakat dengan lingkungan sekitarnya.

Hubungan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pengajian, arisan maupun dapat makan bersama antara anggota keluarga dsb.

- Mensosialisasikan delapan fungsi keluarga bagi keluarga di wilayah garapan.

Selanjutnya pelaksanaan pelayanan secara terpadu yang melibatkan seluruh Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Dalam pelayanan, selain dilaksanakan pelayanan program PKLK terpadu juga dilakukan pelayanan KIE/Penyuluhan massa oleh pengelola/pelaksana.

BAB IV

PEMANTAUAN, PELAPORAN, EVALUASI

A. PEMANTAUAN/PEMBINAAN

Pemantauan/Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan perkembangan dan permasalahan, kelemahan, kekurangan serta kendala dalam upaya penyempurnaan pelaksanaan keterpaduan program PKLK.

Pemantauan/Pembinaan dilakukan oleh Para Pengelola/ Pelaksana program KB dengan melibatkan dari unsur Depag, Deptan, Kemeneg Perumahan Rakyat, TP. PKK secara berjenjang. Pelaksanaan pemantauan dilakukan pada setiap tahapan kegiatan mulai dari perencanaan sampai kegiatan berakhir, dilaksanakan secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Pemantauan dilakukan berbagai cara antara lain : Pencatatan dan pelaporan, Bimbingan dan monitoring, Forum Koordinasi, Observasi dan Survey, penelitian dan lain-lain.

B. PELAPORAN

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kec/Desa oleh Para Pengelola Program KB Kec. dan Desa/Kelurahan dengan tembusan kepada unsur Depag, Deptan, Kemeneg Perumahan Rakyat, TP. PKK setiap 3 bulan sekali, selanjutnya laporan diteruskan ke SKPDKB Kab/Kota, Propinsi dan Pusat setiap tiga bulan sekali.

C. EVALUASI

Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan apakah kegiatan yang telah disusun sesuai rencana kegiatan yang telah dilaksanakan.

Evaluasi selain mengetahui keberhasilan pelaksanaan keterpaduan program PKLK juga faktor-faktor penghambat dan mendukung serta merumuskan kembali seluruh aspek program PKLK yang akan datang.

Evaluasi dilakukan pada pertengahan tahun dan akhir tahun berjalan serta dilakukan berjenjang ditingkat Kec, Kab/Kota, Propinsi dan Pusat dengan peserta bersama dari unsur Deptan, Depag, Kemeneg Perumahan Rakyat, TP. PKK dan BKKBN.

Forum yang digunakan untuk menyampaikan hasil Evaluasi adalah:

- Review
- Pertemuan rutin
- Rakor dan
- Seminar

Dalam Evaluasi Keterpaduan Program PKLK dengan sektor terkait telah disekapati beberapa indikator keberhasilan.

BAB VII PENUTUP

Buku Panduan Keterpaduan Program PKLK dengan sektor terkait lainnya ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan atau pegangan oleh para Pengelola/Pelaksana Program PKLK secara terpadu antara lembaga pengelola KB dengan unsur Deptan, Depag, Kemeneg Perumahan Rakyat dan TP. PKK dalam pelaksanaan PKLK.

Untuk rincian kegiatan dapat disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dalam bentuk Petunjuk Tehnis, Rencana kegiatan terpadu lintas program, lintas sektor terkait. Dengan demikian kegiatan Keterpaduan program PKLK ini dapat menjadi gerakan masyarakat di wilayah garapan.

INDIKATOR KEBERHASILAN

Beberapa Indikator keberhasilan Keterpaduan Program PKLK dapat dikelompokkan dalam INPUT, PROSES dan OUTPUT.

A. INPUT

- Komitmen membentuk Tim Pokja Terpadu serta program kegiatan antara unsur BKKBN, Deptan, Depag, Kemeneg. Perumahan Rakyat dan TP. PKK untuk disinergikan dalam mendukung pelaksanaan PKLK dilapangan.
- Tersedianya informasi tentang pemukiman perumahan keluarga utamanya keluarga miskin (Pra-S dan KS1) yang belum memenuhi kriteria PKLK Fisik dan Non Fisik (MCK, luas < 8 m², lantai bukan dari tanah, belum ada pengajian, dll) di wilayah garapan.
- Tersedianya petunjuk ringkas tentang tata cara penanaman hortikultura sebagai tanaman produktif, sekaligus perindang/penghijauan (warung/apotik hidup) bagi keluarga utamanya keluarga miskin (Pra-S dan KS1) yang tergabung dalam kelompok kegiatan di wilayah garapan.
- Tersedianya kelompok Model PKLK atau Kelompok BLK di wilayah garapan.
- Tersedianya sarana lingkungan fisik (jalan kampung, sanitasi, selokan) dan lingkungan non fisik (seperti rumah-rumah ibadah, mushola atau masjid) di wilayah garapan.
- Tersedianya sarana KIE yang memuat materi PKLK
- Adanya interaksi sosial dalam keluarga, interaksi sosial antar keluarga dengan tetangga, serta terjadinya interaksi sosial masyarakat dengan lingkungannya.

B. PROSES

- Terbentuknya Tim Pokja terpadu yang melibatkan unsur BKKBN, Deptan, Depag, Kemeneg Perumahan Rakyat dan TP. PKK dalam rangka pelaksanaan keterpaduan program PKLK.
- Teridentifikasinya baik aspek progmatis dan kegiatan dari unsur BKKBN, Deptan, Depag, Kemeneg Perumahan Rakyat dan TP. PKK untuk dipadukan atau disatukan dalam rangka pelaksanaan PKLK.
- Pelaksanaan penggerakkan keluarga utamanya keluarga miskin (Pra-S dan KS1) yang tergabung dalam kelompok kegiatan oleh TP. PKK dalam upaya mendukung pelaksanaan PKLK.
- Terfasilitasi pemenuhan kebutuhan rumah dan permukiman yang layak diperuntukkan bagi keluarga utamanya keluarga miskin (Pra-S dan KS1) di wilayah garapan.
- Terlaksananya orientasi/pelatihan bagi keluarga utamanya keluarga miskin (Pra-S dan KS1) yang tergabung dalam kelompok kegiatan tentang proses atau tata cara pelaksanaan penanaman tanaman Hortikultura di wilayah garapan.
- Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Agama bagi keluarga utamanya keluarga miskin (Pra-s dan KS1) yang tergabung dalam kegiatan sebagai proses pembelajaran agama untuk terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.
- Penyediaan sarana dan prasarana ibadah dalam rangka mendukung keluarga Pra-S dan KS1 agar terbentuk keluarga sakinah.

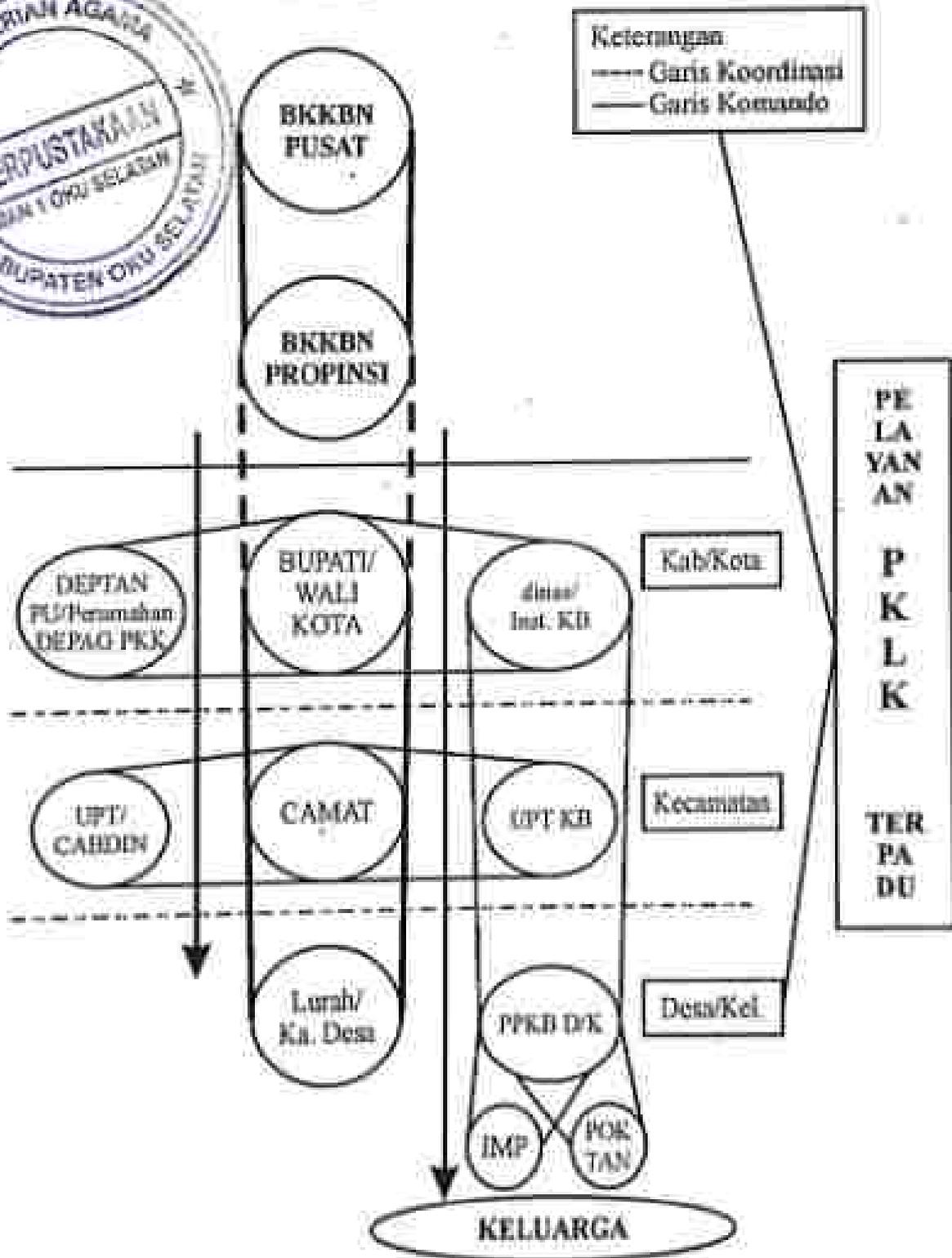
C. OUTPUT

- Terwujudnya Tim Pokja Terpadu yang aktif dalam pelaksanaan PKLK di berbagai tingkatan wilayah.
- Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga yang layak dan terjangkau pada lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan dalam upaya terbentuknya masyarakat yang berjiwa diri, mandiri dan produktif yang tergabung dalam kelompok kegiatan pada wilayah garapan.
- Adanya tanaman bibit hortikultura bagi keluarga utamanya keluarga miskin (Pra-S dan KS1) untuk menambah pendapatan sekaligus penghijauan (Apotik Hidup) pada wilayah garapan.
- Terwujudnya Model PKLK dan Model BLK di wilayah garapan.
- Diterima dan dipahaminya materi KIE tentang peningkatan kualitas lingkungan fisik dan non fisik.
- Adanya prasarana dan sarana lingkungan keluarga seperti (jalan kampung, sanitasi (selokan), rumah-rumah ibadah dan sebagainya yang mendukung pelaksanaan program PKLK.
- Meningkatnya jumlah keluarga tahu dan melaksanakan penanaman tanaman hortikultura dalam mendukung pelaksanaan PKLK.
- Meningkatnya keluarga utamanya keluarga miskin (Pra-S dan KS1) yang tergabung dalam kegiatan yang dapat mengimplementasikan delapan fungsi keluarga di wilayah garapan.
- Meningkatnya jumlah keluarga utamanya keluarga miskin (Pra-S dan KS1) yang menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah serta jumlah keberadaan sarana dan prasarana ibadah dalam mendukung keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

POLA PENGGARAPAN TERPADU PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN KELUARGA



PROSEDUR OPERASIONAL PKLK TERPADU DI TINGKAT KABUPATEN KE BAWAH



TIM EDITOR :

Drs. Sunarto, HM, MPD

Drs. Priyantono, MM